

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam melimpah. Perbedaan ras, etnis, suku, dan adat istiadat menunjukkan keberagaman. Kekayaan alam dan budaya menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi besar bagi pengembangan pariwisata. Setiap daerah mempunyai keunggulan masing-masing termasuk potensi alam yang dimiliki. Dengan adanya potensi tersebut, pemerintah memanfaatkannya sebagai destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik dari mancanegara maupun wisatawan domestic.

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki potensi di industry pariwisata dimana terdapat berbagai sumber daya alam termasuk hutan. Yogyakarta memiliki kawasan hutan dengan luas $\pm 16.358,60$ Ha. Kawasan hutan dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY tidak sebagai pelaksana pengelola hutan tetapi sebagai pengendali. KPH Yogyakarta ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK. 721/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang penetapan wilayah KPH Yogyakarta. KPH Yogyakarta berpotensi besar untuk mengelola hutan menjadi objek wisata. (Kph.go.id)

Dengan adanya hutan lindung, kawasan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi potensi wisata. Seperti yang terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) DIY nomor 7 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pengelolaan hutan lindung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat. Di Bantul terdapat 7 objek wisata yang dikelola oleh Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan diantaranya Puncak Becici, Bukit Mojo Gumelan, Bukit Panguk Kediwung, Pinus Asri, Seribu Batu Songgo Langit, Pinus Sari, dan Pinus Pengger.

Pariwisata yang memanfaatkan hutan pinus sebagai daya tarik pengunjung, salah satunya adalah Puncak Becici yang terletak di Dusun Gunung Cilik, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Puncak becici memiliki luas 97,2 hektar namun yang dikelola oleh masyarakat hanya 4,4 hektar. Dahulu lokasi ini merupakan kawasan hutan produksi penghasil getah pinus, sehingga banyak masyarakat yang menyadap getah pohon tersebut, namun apabila kegiatan itu terus dilakukan akan merusak pohon. Kemudian beberapa warga sekitar sadar akan potensi wisata yang dimiliki oleh Puncak Becici sehingga mereka mulai mengelola hutan tersebut menjadi obyek wisata. Puncak Becici merupakan hutan lindung dibawah pengelolaan RPH Mangunan. Pemerintah memberikan izin kepada masyarakat sekitar untuk mengelola hutan. Wisata ini memanfaatkan hutan pinus dan pemandangan alamnya. Puncak Becici focus pada kegiatan alam seperti

outbond, camping, dan panorama. Wisata ini dikelola oleh masyarakat sekitar dengan membentuk kepengurusan sebagai pengelola Puncak Becici. Hal ini memberi dampak yang positif bagi penduduk sekitar karena dapat mengurangi pengangguran dan memberi peluang kepada warga lainnya untuk berdagang/berjualan di lokasi tersebut. Karena pedagang yang menyediakan aneka makanan, minuman dan lain-lain, adalah warga asli dusun Munthuk. Hal tersebut berdampak besar pada perekonomian warga sekitar dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Area perbukitan dengan kondisi alam yang masih asri ini menarik wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata Puncak Becici. Bahkan pada pertengahan tahun 2017 Puncak Becici dikunjungi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, untuk berlibur. Masyarakat juga mempromosikan wisata tersebut dengan menggunakan media sosial seperti instagram dan facebook. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat besar dimana pengunjung yang datang semakin melonjak. Berikut merupakan jumlah kunjungan wisatawan Puncak Becici dari tahun 2016-2018 :

Tabel 1.1. Data Kunjungan Wisatawan Puncak Becici

Tahun 2016-2018

No	Bulan	2016 (Orang)	2017 (Orang)	2018 (Orang)
1	JANUARI	11650	34076	46070
2	FEBRUARI	11170	20943	36329
3	MARET	10574	21032	40263
4	APRIL	10754	27695	49740
5	MEI	16106	24728	35786
6	JUNI	11196	29177	69840

7	JULI	32709	72971	65354
8	AGUSTUS	19897	41995	44534
9	SEPTEMBER	18033	44839	-
10	OKTOBER	21223	45128	-
11	NOVEMBER	18761	33880	-
12	DESEMBER	40119	74781	-
	Jumlah	222192	471245	387916

Sumber: Pengelola Puncak Becici

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah pengunjung di Puncak Becici sebanyak 222.192 pengunjung, pada tahun 2017 berjumlah 471.245 pengunjung, dan pada tahun 2018 sampai bulan agustus berjumlah 347.916 pengunjung. Adanya perubahan yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Puncak Becici terlihat bahwa tahun 2016 lebih sedikit dibandingkan tahun 2017 dan 2018. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2016 Puncak Becici hanya dikelola oleh masyarakat sekitar saja dan tidak melibatkan pemerintah. Namun, pada awal tahun 2017 pengelola Puncak Becici mulai bekerja sama dengan PEMDA DIY sehingga pemerintah mulai memberdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan setiap bulan untuk memberikan kompetensi dan kemampuan terhadap masyarakat dalam mengelola Puncak Becici. Sehingga, membuktikan bahwa pariwisata akan lebih berkembang apabila dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk permasalahan pembagian hasil dari pengelolaan wisata Puncak Becici sebesar 25% dibagi kepada pemerintah yang akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap minggunya dan 75% untuk pengelola wisata sendiri.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat yakni secara sosial, budaya dan ekonomis. Namun apabila pengembangan tersebut tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat. Tata kelola pariwisata yang baik melibatkan tiga pihak yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Masyarakat local sebagai actor dalam mengembangkan pariwisata, pihak swasta menyediakan pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata, sedangkan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan daerah serta menetapkan kebijakan guna mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai tata kelola pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat yaitu mengelola pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat jadi masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan tersebut, sehingga manfaat dari kepariwisataan tersebut diperuntukan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menentukan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat di Obyek Wisata Puncak Becici Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu “Untuk Mengetahui Bagaimana Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat di Obyek Wisata Puncak Becici Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.”

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa Ilmu Pemerintahan, khususnya sebagai bahan referensi dalam bidang tata kelola pariwisata berbasis masyarakat.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi pemerintah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam tata kelola pariwisata berbasis masyarakat.

b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan rujukan pada penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Masyarakat, dapat menambah wawasan kepada masyarakat mengenai tata kelola pariwisata berbasis masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka atau literature review dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka

No	Judul	Penulis / Tahun	Isi	Kelebihan / Kekurangan
1.	Pengelolaan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat di Hutan Pinus Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta	Hendra Erih / 2018	Obyek wisata ini dikelola oleh masyarakat sekitar dan masyarakat turut berperan aktif dalam pengembangan kepariwisataan. Dalam pembangunannya terdapat factor pendukung dan penghambat. Factor pendukung meliputi mempromosikan keindahan wisata hutan melalui kegiatan pameran, sedangkan factor penghambatnya yaitu terbatasnya anggaran, kurangnya lahan parkir dan air bersih	Kelebihan dari pengelolaan tersebut yaitu masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan sehingga memudahkan pariwisata tersebut untuk berkembang, dengan adanya keterlibatan masyarakat maka pengangguran di desa tersebut dapat berkurang. Sedangkan kekurangannya adalah masyarakat sekitar belum mampu memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada.
2.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata	Abdur Rohim / 2013	Pengelolaan desa wisata Bejiharjo dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah	Kelebihan yang didapat yaitu dengan adanya pemberdayaan tersebut,

	(Studi di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY)		baik karena dalam pelaksanaannya sudah tertata dengan matang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar wisata tersebut berkembang dengan baik. Adanya pemberdayaan tersebut memberi manfaat sosial, budaya dan ekonomi terhadap masyarakat.	masyarakat menjadi lebih mengerti mengenai pengelolaan pariwisata yang baik. Sedangkan kekurangannya adalah belum semua masyarakat turut berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata
3.	Peranan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Pariwisata di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara	Heri Santoso / 2015	Pengelolaan pariwisata di obyek wisata ini didominasi oleh pemerintah sehingga masyarakat kurang dilibatkan dalam pengelolaannya.	Kelebihan yang didapat yaitu, tata kelola para pemangku kepentingan terjalin dengan baik sedangkan kekurangannya yaitu pengelolaan pariwisata di lokasi ini tidak melibatkan masyarakat sehingga manfaat dari pariwisata tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar.
4.	Strategi Tata Kelola Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur	Handini Widiyanti / 2016	Tata kelola dalam pengembangan ekowisata ini melibatkan beberapa peran stakeholders yaitu pemerintah, swasta dan	Kelebihan yang didapat yaitu dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta berdampak besar

			masyarakat. Namun disini peran masyarakat hanya sedikit karena didominasi oleh pemerintah dan swasta.	pada pengembangan pariwisata di lokasi tersebut. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang melibatkan masyarakat didalamnya.
5.	Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.	Sugi Rahayu / 2016	Temuan yang didapat yaitu mengetahui bagaimana pengembangan CBT yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Kelebihan dari pengembangan ini yaitu pemerintah telah berupaya dan memberikan inovasi baru pada pengelolaan obyek wisata yang berbasis masyarakat. Sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, infrastruktur yang belum memadai dan kemitraan yang terjalin belum maksimal.
6.	Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Pentingsari dan Sambu Kabupaten Sleman.	Tri Sunu Yulianto / 2015	Penelitian ini membahas mengenai modal sosial masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan membandingkan dikedua wisata tersebut. Terdapat perbedaan dalam pengembangan kedua wisata	Kelebihan yang didapat yaitu mengetahui tingkat modal sosial yang dimiliki oleh kedua desa wisata tersebut sehingga dapat memotivasi desa lainya agar mampu berkembang

			yaitu modal sosial yang berbeda, peran serta, kelembagaan, dan manfaat memperlihatkan kondisi yang berbeda.	sedangkan kekurangannya yaitu kesadaran masyarakat pentingsari mengenai potensi wisata tersebut masih rendah sehingga belum dimanfaatkan dengan baik.
7.	Tata Kelola Pariwisata di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun	Wayu Amnah / 2016	Tata kelola pariwisata di daerah ini cukup baik dimana adanya kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan pariwisata dan masyarakat turut melakukan pemeliharaan terhadap objek wisata tersebut. Dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan buru, sector swasta belum terlibat.	Kelebihan dari tata kelola pariwisata tersebut adalah kinerja pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dapat terjalin dengan baik sedangkan kekurangannya adalah belum adanya pemberdayaan masyarakat.
8.	Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat (Kasus Obyek Wisata Alam Rammang-Rammang	Mauizatul Hasanah / 2017	Dalam pengelolaannya tidak semua masyarakat sadar dan mau mengelola wisata tersebut, selain itu anggaran untuk	Kelebihan dengan adanya pariwisata berbasis masyarakat di daerah ini adalah dapat dapat memperbaiki

	Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan)		pengembangan wisata alam Ramang-ramang masih kurang sehingga masyarakat tidak bisa mengelola dengan maksimal.	kehidupan dan sumber daya manusia, sedangkan kekurangannya adalah partisipasi masyarakat masih rendah dan kurangnya anggaran untuk pengembangan wisata.
9.	Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara	Hadiwijaya Lesmana dan Dini Purbani / 2015	Dalam pengelolaan pengembangan wisata bahari di Pulau Kaledupa, instansi, sumber daya alam dan informative belum terkoordinir dengan baik.	Kelebihan dari adanya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di pulau ini yaitu memberikan potensi kepada masyarakat untuk mengelola sehingga nantinya dapat mensejahterakan masyarakat sekitar, sedangkan kekurangannya adalah kerjasama antara beberapa pihak belum terjalin dengan baik.
10.	Peran Ekowisata dalam Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Pada Taman Wisata Alam	Soedigdo Doddy dan Yesser Priono / 2013	Adanya ekowisata dalam pemberdayaan tersebut cukup berperan namun hanya secara pasif, selain itu terdapat beberapa factor yang	Kelebihan dari adanya ekowisata dalam pariwisata berbasis masyarakat dipenelitian ini yaitu masyarakat dibekali keahlian

	(TWA) Bukit Tangkiling Kalimantan Tengah		berpengaruh dalam mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat di Kota Batu.	dalam pengelolaan ekowisata sehingga dapat dijalankan dengan baik, sedangkan kekurangannya yaitu tidak semua masyarakat terlibat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
--	--	--	---	---

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua peneliti cenderung menganalisis mengenai partisipasi / keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, ada beberapa peneliti yang menganalisis mengenai tata kelola namun tidak dikaitkan dengan keterlibatan masyarakat setempat. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini ingin mengkaji mengenai bagaimana tata kelola yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata tersebut. Kemudian penelitian ini juga ingin mengetahui mengenai bagaimana dampak Pariwisata Berbasis Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di sekitar Obyek Wisata Puncak Becici, Dlingo, Bantul, Yogyakarta.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Tata Kelola

a. Pengertian Tata Kelola

Menurut Koiman (2009:273), governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Rochman (2009:276) Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif.

b. Prinsip-Prinsip Good Governance

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (good governance) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2009:289)

1) Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus

dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

2) Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

3) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada public sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder).

2. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu jenis industry baru yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam peningkatan penghasilan, penyediaan lapangan kerja, standard hidup serta menstimulasi sector-sektor produktivitas lainnya. Sedangkan menurut Oka A. Yoety, Pariwisata adalah suatu pengalaman mengunjungi atau mendatangi suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, yang

dilakukan oleh seseorang atau kelompok sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian serta kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial dan budaya alam.

Beberapa pengertian mengenai pariwisata menurut para ahli:

- 1) Menurut Suwanto (2004:3) pariwisata adalah proses berpergian yang bersifat sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat yang lainnya. Dorongan kepergian seseorang atau sekelompok orang disebabkan adanya kepentingan, baik kepentingan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, kesehatan maaupun sekedar ingin tahu, belajar maupun menambah pengalaman.
- 2) Menurut Sunaryo (2013: 2) di dalam UU Nomor. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- 3) Selain itu, menurut WTO atau World Tourism organization dalam Muljadi (2010: 8) pariwisata adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dan tinggal ditempat lain selain lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun untuk bisnis, kesenangan dan keperluan lain.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata adalah kegiatan atau perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ke suatu tempat yang keluar dari tempat tinggal biasanya dengan tujuan untuk kesenangan ataupun keperluan lainnya.

b. Kriteria Pariwisata

Menurut Yoeti (2008:8) pariwisata memiliki empat kriteria, yaitu:

- 1) Perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ketempat yang berbeda, perjalanan tersebut dilakukan bukan di tempat orang tersebut biasanya tinggal.
- 2) Tujuan perjalanan adalah untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di Negara ataupun kota yang dikunjungi.
- 3) Wisatawan tersebut belanja menggunakan uang yang dibawa dari Negara asalnya, dimana dia biasa tinggal dan bukan hasil yang diperoleh dari perjalanan wisata yang dilakukan.
- 4) Perjalanan yang dilakukan wisatawan minimal 24 jam atau lebih.

c. Bentuk-Bentuk Pariwisata

Menurut Yoeti dalam (Jejen, 2018:13) bentuk pariwisata di kelompokkan menjadi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Tujuan yaitu pariwisata budaya, pariwisata rekreasi, pariwisata sosial, pariwisata olahraga, pariwisata politik, pariwisata kesehatan dan pariwisata keagamaan.
- 2) Berdasarkan Letak Geografi, yaitu pariwisata regional, pariwisata local, nasional tourism, regional international tourism, international tourism.
- 3) Berdasarkan pengaruh terhadap neraca pembayaran yaitu pariwisata aktif adalah kegiatan pariwisata dengan masuknya wisatawan asing ke dalam suatu Negara tertentu sehingga mendatangkan devisa. Sedangkan

pariwisata pasif adalah keluarnya penduduk ke suatu Negara lain untuk melakukan kegiatan kunjungan sehingga mengurangi cadangan devisa.

- 4) Menurut alasannya yaitu seasional tourism adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, occational tourism (kegiatan pariwisata yang dilakukan menurut kejadian atau event-event tertentu)

Pelaku pariwisata adalah seluruh pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan pariwisata. Menurut Damanik dan Weber (2006:19) yang menjadi pelaku pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Wisatawan; yang disebut dengan wisatawan yaitu pengguna produk layanan (konsumen). Biasanya wisatawan berkunjung karena berbagai motif dan latar belakang yang berbeda-beda (ekspektasi, minat, karakteristik sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya) dalam melakukan kegiatan pariwisata. Adanya perbedaan tersebut menjadikan wisatawan sebagai pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata.
- 2) Penyedia Jasa/Industri Pariwisata; usaha yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk pariwisata disebut dengan penyedia jasa. Penyedia jasa tersebut digolongkan menjadi dua golongan, yaitu:
 - a) Pelaku Langsung, adalah jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan dapat langsung dipenuhi yang disediakan oleh usaha-usaha wisata di lokasi tersebut. Usaha-usaha tersebut adalah restoran, atraksi hiburan, hotel, pusat informasi wisata dan lain-lain.
 - b) Pelaku Tidak Langsung, adalah suatu usaha yang secara tidak langsung mendukung pariwisata. Yang termasuk dalam usaha ini

adalah penerbitan buku atau lembaran panduan wisata, usaha kerajinan tangan dan sebagainya.

- 3) Pendukung Jasa Wisata; adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk itu. Termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM, dan sebagainya.
- 4) Pemerintah; sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain dalam memainkan peran masing-masing.
- 5) Masyarakat Lokal; adalah masyarakat yang bermukim di kawasan wisata. Mereka merupakan salah satu aktor penting dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, masyarakat lokasi merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang merupakan sumberdaya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada di tangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir sepenuhnya

milik mereka. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka.

- 6) Lembaga Swadaya Masyarakat; adalah organisasi yang sering melakukan aktivitas kemasyarakatan di macam-macam bidang dan merupakan organisasi non pemerintah. Biasanya dibidang pariwisata seperti proyek WWF untuk perlindungan Orang Utan di Kawasan Bahorok Sumatera Utara atau di Tanjung Putting Kalimantan Selatan, Kelompok Pecinta Alam, Walhi, dan lain-lain

3. Tata Kelola Pariwisata

a. Pengertian Tata Kelola Pariwisata

Menurut Muntasib dalam (Widiyanti, 2016), tata kelola pariwisata adalah bagian dari governance baik dari tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tata kelola pariwisata yaitu pengelolaan pariwisata secara kolaboratif yang melibatkan beberapa sector, diantaranya sector pemerintah dan non pemerintah. Maka tata kelola dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengambilan keputusan dalam tata kelola pariwisata alam yang dikelola masyarakat terdapat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda-beda.
- 2) Pengelolaan pariwisata alam ditentukan bersama.

- 3) Tidak ada pelaku dominan yang menentukan gerak aktor lain walaupun terdapat banyak aktor yang terlibat.
- 4) Adanya relasi dari pelaku dan sector pariwisata atas budaya dan sumberdaya alam untuk wisata.
- 5) Perlu mempersiapkan perencanaan yang mengikuti jaman sekaligus dapat membuat inovasi baru sebagai sesuatu yang menjadi ciri khas Indonesia.

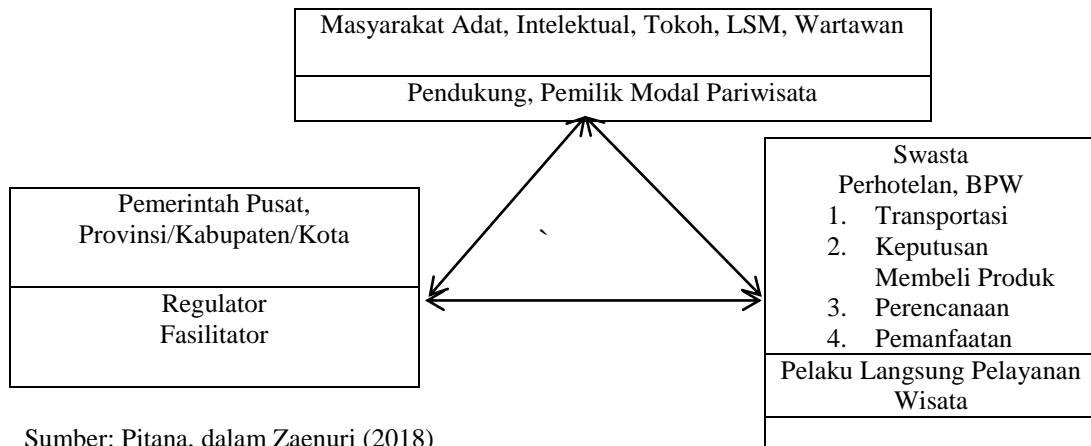
b. Governance dalam Pariwisata

Governance tidak hanya mengandung arti pemerintahan mengenai suatu kegiatan, namun juga mengandung arti pengelolaan, kepengurusan, pembinaan, penyelenggaraan, pembinaan dan dapat diartikan sebagai pemerintahan. (Sendarmayanti, 2012:3) Teori governance berpandangan bahwa saat ini berbagai bentuk pelayanan public yang diberikan oleh Pemerintah kurang efisien dan adil karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat namun kapasitas pemerintah semakin terbatas, sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Begitu juga dengan pengembangan pariwisata, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola pariwisata agar mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada wisatawan.

Penerapan *governance* dalam pariwisata di Indonesia telah dikemukakan oleh Pitana dalam (Zaenuri, 2018:31) membahas aktor-aktor yang terlibat dan bekerjasama dalam system kepariwisataan. Konsep

mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam system kepariwisataan mengacu pada tiga pilar *governance*. Seperti pada gambar berikut:

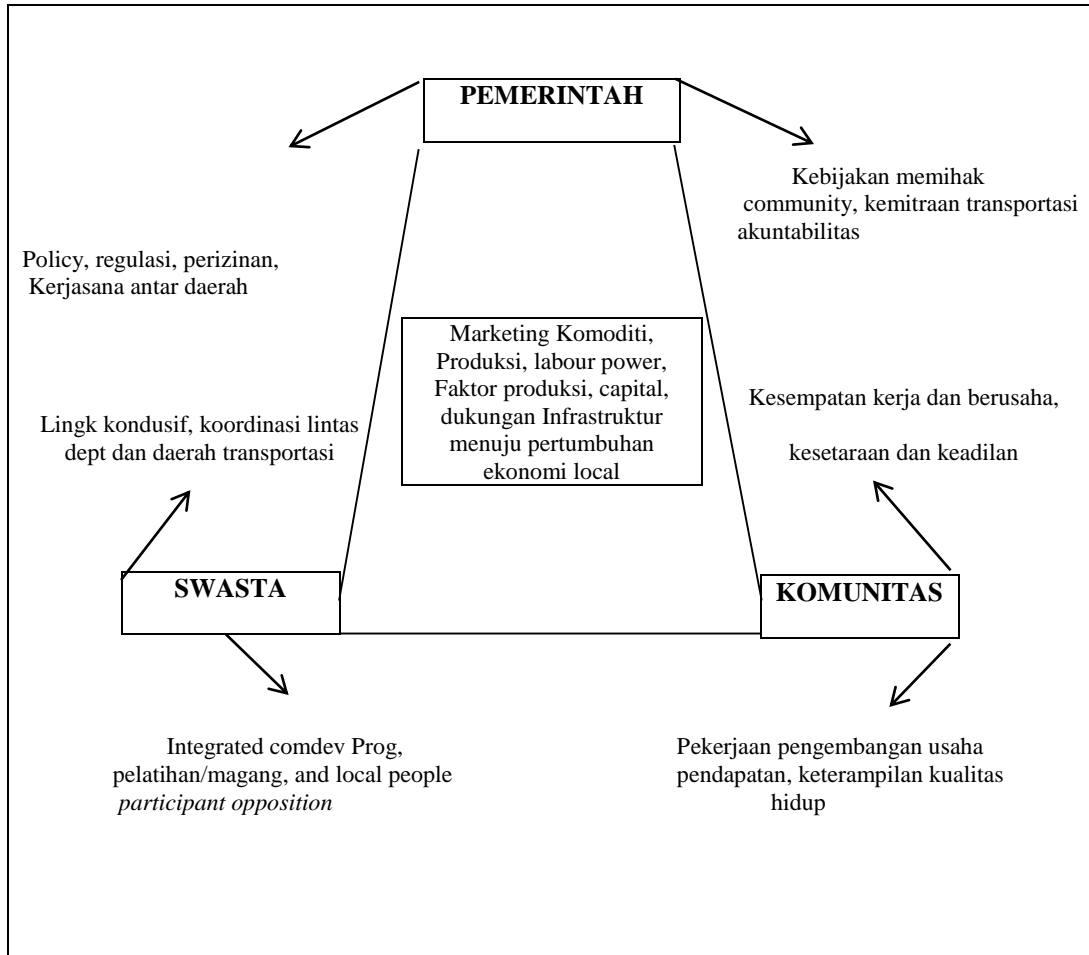
Gambar 1.1 Sektor Pariwisata dalam Tiga Pilar Governance



Sumber: Pitana, dalam Zaenuri (2018)

Syahrir, dalam Zaenuri (2018) lebih menjelaskan mengenai ilustrasi bahwa ketiga pilar *governance* tersebut dapat berinteraksi dalam mengelola persoalan-persoalan public dalam bentuk kemitraan. Untuk menyelenggarakan kebijakan dan mengelola berbagai urusan public termasuk pariwisata, kemitraan yang terjalin antara pemerintah, swasta dan masyarakat dapat digunakan. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Model Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat



Sumber: Syahrir, dalam Zaenuri, 2018: 32.

Dari model tersebut menjelaskan bahwa kemitraan dapat terjalin karena masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. Secara keseluruhan ketiga pihak tersebut akan memberikan manfaat bagi pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Kotak ditengah menunjukkan aktivitas yang bisa dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga pihak yang bersifat sinergis.

Dalam hubungan kemitraan di atas, masing-masing pihak mempunyai peran yang spesifik dan akan memperoleh manfaat secara bersama-sama, yaitu:

- 1) Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan swasta maka pemerintah berperan menyusun kebijakan serta aturan main, menyediakan pelayanan perizinan, dan pengembangan kerjasama antara daerah yang memungkinkan pelaku industry pariwisata dapat saling mengembangkan investasi. Sedangkan dari pihak swasta, kemitraan akan menggairahkan peran swasta untuk melakukan investasi karena telah memperoleh iklim yang kondusif atas peran pemerintah dalam membeikan kejelasan regulasi dan perizinan.
- 2) Dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat (komunitas), pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan bersifat transparan serta akuntabel. Hal tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperoleh kesempatan kerja dan berusaha dalam bingkai kesetaraan dan keadilan.

4. Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

a. Pengertian Pariwisata Berbasis Masyarakat

Baskoro, BRA (2008) mengatakan bahwa *Community Based Tourism* (CBT) adalah suatu konsep yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat/komunitas agar lebih mampu memahami nilai-nilai dan aset

yang dimiliki, seperti adat istiadat, gaya hidup, kebudayaan, dan masakan kuliner. Komunitas tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk pengalaman berwisata.

Menurut (Zubaedi, 2014) pemberdayaan masyarakat yaitu suatu cara agar mampu meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga dengan adanya pemberdayaan tersebut masyarakat yang kurang mampu dapat berkembang dan melepaskan diri dari kondisi kemiskinan. Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, dengan cara memotivasi, mendorong, dan, mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata.

Sedangkan menurut (Mudana, 2015) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dibidang pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber daya local dan meningkatkan kualitas aktivitas pariwisata yang berkelanjutan.

Konsep yang menjabarkan mengenai peran komunitas dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah menjadikan masyarakat asli daerah tersebut sebagai aktor utama melalui pemberdayaan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yaitu dengan mempromosikan potensi wisata yang ada, seperti keindahan alam dan budaya.

b. Ciri-ciri Pariwisata Berbasis Masyarakat

Strategi untuk pemberdayaan masyarakat adalah dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Nasikun dalam (Sastrayuda, 2010:3) mengemukakan ciri-ciri dan jumlah karakter dalam pengembangan pariwisata. sebagai berikut:

Pariwisata berbasis masyarakat memiliki ciri-ciri yang unik dan karakter yang berbeda dalam suatu organisasi

- 1) Pariwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitasnya dalam properti dan ciri-ciri unik dan karakter yang lebih unik diorganisasi dalam skala yang kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan secara ekologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional.
- 2) Pariwisata berbasis masyarakat komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan objek-objek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal.
- 3) Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari pariwisata konvensional, dimana komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

c. Prinsip-prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat

Beberapa ahli mengatakan pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* memiliki prinsip-prinsip dasar, menurut UNEP dan WTO (2005) dalam (Rahayu, 2016) terdapat sepuluh prinsip dari pariwisata berbasis masyarakat yaitu: (1) Pertama, mengembangkan kepemilikan komunitas, mengakui, dan mendukung dalam industry pariwisata, (2) Kedua, dalam memulai setiap aspek melibatkan seluruh anggota komunitas, (3) Ketiga, mengembangkan kualitas hidup komunitas, (4) Keempat, mengembangkan kebanggaan komunitas, (5) Kelima, dapat menjamin keberlanjutan lingkungan, (6) Keenam, tetap mempertahankan karakter, keunikan dan budaya di lokasi tersebut, (7) Ketujuh, turut membantu komunitas dalam perkembangan pembelajaran mengenai pertukaran budaya, (8) Kedelapan, dapat menghormati martabat manusia dan perbedaan budaya, (9) Kesembilan, keuntungan dari kegiatan pariwisata didistribusikan secara adil kepada anggota komunitas, (10) Kesepuluh, turut berperan dalam dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek-proyek yang terdapat dikomunitas.

Menurut (Sunaryo, 2013:140) Pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* berkaitan dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat setempat untuk pembangunan kepariwisataan. Dalam pariwisata, terdapat dua perspektif dalam partisipasi masyarakat, yaitu dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan

dengan hasil yang didapat oleh masyarakat dari pengembangan pariwisata. Strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat atau community based tourism, memiliki tiga prinsip pokok, yaitu:

- 1) Manfaat kegiatan kepariwisataan bagi masyarakat local
- 2) Melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan
- 3) Masyarakat local dibekali dengan pendidikan kepariwisataan

Bedasarkan penjabaran diatas, memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berbeda dengan pariwisata pada umumnya. Didalam pariwisata berbasis masyarakat, komunitas adalah aktor utama sebagai pengelola pariwisata dan bertujuan untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat.

Menurut Hadiwijoyo dalam (Novia, 2014:478) agar pelaksanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat dapat berhasil dengan baik, terdapat elemen-elemen yang harus diperhatikan yaitu:

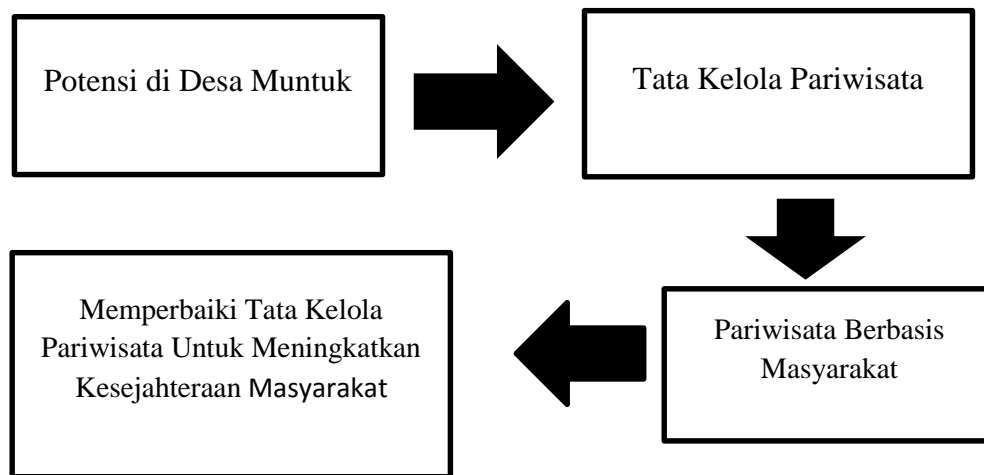
- 1) Sumberdaya alam dan budaya
 - a) Sumber daya alam terjaga dengan baik
 - b) Ekonomi local dan modal produksi tergantung keberlanjutan pengguna sumberdaya
 - c) Kebudayaan yang unik sebagai tujuan
- 2) Organisasi-organisasi masyarakat

- a) Masyarakat berbagai kesadaran, norma dan ideology
 - b) Masyarakat memiliki tokoh yang dituakan yang mengerti akan tradisi local dan pengetahuan serta kebijakan setempat
 - c) Masyarakat memiliki rasa saling memiliki dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh mereka sendiri
- 3) Manajemen
- a) Masyarakat memiliki aturan dan peraturan untuk lingkungan, budaya dan manajemen pariwisata
 - b) Organisasi local atau mekanisme yang ada untuk mengelola pariwisata dengan kemampuan untuk menghubungkan pariwisata dan pengembangan masyarakat
 - c) Keuntungan didistribusikan secara adil bagi masyarakat
 - d) Keuntungan dari pariwisata memberikan kontribusi terhadap dana masyarakat untuk pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat
- 4) Pembelajaran (learning)
- a) Membina proses belajar bersama antara tuan rumah dan tamu
 - b) Mendidik dan membangun pemahaman tentang budaya dan cara hidup yang beragam
 - c) Meningkatkan kesadaran konservasi alam dan budaya di kalangan wisatawan dan masyarakat setempat

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yaitu model konseptual yang menjelaskan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka dasar pemikiran yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran Penelitian



Kerangka pemikiran dalam Gambar 1.3. tersebut di uraikan menjadi sebagai berikut :

Desa Muntuk memiliki potensi wisata yaitu hutan pinus, melihat adanya potensi wisata tersebut maka langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk mengelola potensi wisata yang terdapat di desa tersebut. Setelah mengetahui potensi dan cara untuk mengelola potensi wisata, maka selanjutnya masyarakat bekerjasama dengan pemerintah untuk mengelola wisata agar mampu lebih berkembang dan mampu menarik wisatawan agar berkunjung ke desa Muntuk. Masyarakat dipercaya oleh pemerintah untuk

mengelola sepenuhnya wisata yang ada dengan inovasi yang dimiliki namun tetap menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak pohon. Ketika pengelolaan tersebut berjalan dengan baik dan wisatawan tertarik untuk berkunjung, maka hasilnya adalah dapat mensejahterakan masyarakat sekitar karena hasil dari pendapatan tersebut sebagian besar diperuntukan bagi masyarakat selain itu juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Desa Muntuk.

H. Definisi Konseptual

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tata Kelola

Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif.

2. Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengunjungi suatu tempat tertentu yang bersifat sementara sebagai usaha untuk mencari kesenangan atau keperluan tertentu.

3. Tata Kelola Pariwisata

Tata kelola pariwisata yaitu pengelolaan pariwisata yang melibatkan peran dari pemerintah dan non pemerintah. Yang disebut non pemerintah yaitu masyarakat dan swasta.

4. Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata Berbasis masyarakat adalah konsep yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat/komunitas agar dapat mengetahui potensi wisata yang dimiliki di daerahnya. Sehingga masyarakat/komunitas tersebut dapat memanfaatkan potensi wisata yang bertujuan untuk meningkatkan standard kehidupan masyarakat.

I. Definisi Operasional

Adapun Definisi Operasional dari penelitian ini yaitu tata kelola pariwisata berbasis masyarakat dan setiap indikator diberi peran dari pemerintah, yang diuraikan sebagai berikut:

Table 1.3 Definisi Operasional

Indikator	Parameter
<p>Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat</p> <p>a. Sumber daya alam dan budaya</p> <p>b. Organisasi-organisasi masyarakat</p> <p>c. Manajemen</p>	<p>a. Sumber daya alam terjaga dengan baik</p> <p>b. Ekonomi local dan modal produksi tergantung keberlanjutan pengguna sumberdaya</p> <p>c. Kebudayaan yang unik sebagai tujuan</p> <p>a. Masyarakat berbagai kesadaran, norma dan ideology</p> <p>b. Masyarakat memiliki tokoh yang dituakan yang mengerti akan tradisi local dan pengetahuan serta kebijakan setempat</p> <p>c. Masyarakat memiliki rasa saling memiliki dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh mereka sendiri</p> <p>a. Masyarakat memiliki aturan dan peraturan untuk lingkungan, budaya dan manajemen pariwisata</p> <p>b. Organisasi local atau mekanisme yang ada untuk mengelola pariwisata dengan kemampuan untuk menghubungkan pariwisata dan pengembangan masyarakat</p> <p>c. Keuntungan didistribusikan secara adil bagi masyarakat</p>

<p>d. Pembelajaran / <i>Learning</i></p>	<p>d. Keuntungan dari pariwisata memberikan kontribusi terhadap dana masyarakat untuk pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.</p> <p>a. Membina proses belajar bersama antara tuan rumah dan tamu</p> <p>b. Mendidik dan membangun pemahaman tentang budaya dan cara hidup yang beragam</p> <p>c. Meningkatkan kesadaran konservasi alam dan budaya di kalangan wisatawan dan masyarakat setempat</p>
--	--

J. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena dalam proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) sehingga tidak memungkinkan apabila menggunakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai obyek yang akan diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:14) sifat penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berisikan data berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Sedangkan menurut Arikunto

(2006:16) deskriptif yaitu penggambaran secara menyeluruh. Maka dalam penelitian kualitatif deskriptif lebih menekankan pada penggambaran bagaimana proses masalah itu muncul berdasarkan data yang ada di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Obyek Wisata Puncak Becici yang terdapat di Dusun Gunung Cilik, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Lokasi ini diambil untuk mempermudah peneliti dalam mencari data selain itu melibatkan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Obyek Wisata Puncak Becici adalah Pengelola setempat.

4. Unit Analisa

Unit analisa adalah focus atau komponen yang akan diteliti peneliti untuk mendapatkan data. Unit analisa data yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang validitas, dan reabilitas, maka unit analisa yang dilakukan adalah di Obyek Wisata Puncak Becici mencakupi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici, Koperasi Noto Wono, masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Obyek Wisata Puncak Becici.

5. Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan menyusun penelitian ini adalah antara lain:

- a. Sumber Data Primer Data primer diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara dari sumber pertama yang berupa keterangan atau fakta-fakta. Adapun data primer yang dibutuhkan peneliti untuk bisa mendapatkan data secara langsung yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai KPH Yogyakarta, RPH Mangunan, Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici, dan Koperasi Noto Wono.
- b. Sumber Data Sekunder Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan dari adanya penelitian adalah untuk memperoleh data. Didalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke lokasi yang telah ditentukan guna mengetahui dan mengamati lebih dalam. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.
- b. Dokumen atau Bahan Pustaka, menurut Sugiyono (2017:224) penelitian ini melakukan pengumpulan data, membaca, dan mengkaji dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan pustaka lainnya dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan masalah atau objek yang diteliti. (Sugiyono, 2017:224)
- c. Wawancara Penelitian, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh data yang diperoleh dari narasumber. Di dalam proses wawancara selain mendengarkan dan menulis, peneliti juga dapat merekamnya. Dalam wawancara yang akan dilakukan nanti peneliti ingin mengetahui bagaimana Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat di Obyek Wisata Puncak Becici, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai KPH Yogyakarta, RPH Mangunan, Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici, Koperasi Noto Wono dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Obyek Wisata Puncak Becici.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, bahwa teknik analisis deskriptif adalah teknik untuk menganalisis data yang telah terkumpul dengan mendeskripsikan atau menggambarkan sebagaimana adanya. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.